

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

terpisah dari daerah Minang pada masa penjajah Jepang pada tahun 1942. Kabupaten Kampar memiliki beberapa suku diantaranya Melayu, Jawa, Minang, Batak dan sebagainya. Suku Minang yang datang ke Kampar umumnya mereka bermata pencaharian sebagai pedagang.

B. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 817.184 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 423.903 jiwa (51,87%) dan wanita 393.281 jiwa (48,13%). Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 73,63% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011, yaitu 713.078 jiwa.

Dari 21 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kampar, Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/KM², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara, Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur. Sedangkan kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kir Hiliri, XIII Koto Kampar, Gunung Sahilan, Kampar Kiri, dan Tapung Hilir berkisar antara 9 s/d 51 jiwa/KM.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar pada tahun 2012, sebanyak 1.626 orang. Jumlah tersebut menurun drastis yaitu sebesar 411%, jika dibandingkan dengan pencari kerja pada tahun 2011, yaitu sebanyak 8.316 orang.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan

C.1. Kelembagaan

Semenjak Tahun 2009 Kabupaten Kampar telah menerapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Pemerintah Kab. Kampar memiliki 54 SKPD, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Lembaga Pengawasan, 18 (delapan belas) Dinas, 8 (delapan) Badan, 4 (empat) Kantor dan 1 (satu) Lembaga Teknis Daerah (RSUD).

C.1.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pelayanan staf Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 Asisten dan 11 Kepala Bagian.

C.1.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan

secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C.1.3. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.

C.1.4. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 18 (delapan belas) Dinas, yaitu : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; Dinas Perindustrian, Perdagangan; Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan; Dinas Perikanan; Dinas Peternakan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Bina Marga dan Pengairan; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C.1.5. Badan

Badan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 9 (sembilan) Badan, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Lingkungan Hidup; Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Promosi Penanaman Modal; Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

C.1.6. Kantor

Kantor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang diserahkan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan Pemerintah daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berjumlah 4 (empat) yaitu: Kantor Perpustakaan dan Arsip; Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Terpadu.

C.1.7. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis yang ada adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

D. Struktur Pemerintahan

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan. Camat sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Camat membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat

dalam wilayah kecamatan. Adapun Data Kecamatan dan Desa serta Kelurahan dalam Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Kecamatan dan Desa serta Kelurahan dalam Kabupaten Kampar Tahun 2012

NO	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah	Persentase
1	Kampar Kiri	1	19	20	8,1 %
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24	9,7 %
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8	3,2 %
4	Gunung Sahilan	-	11	11	4,4 %
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9	3,6 %
6	XIII Koto Kampar	1	12	13	5,3 %
7	Bangkinang Barat	-	9	9	3,6 %
8	Salo	-	6	6	2,4 %
9	Tapung	-	25	25	10,2 %
10	Tapung Hulu	-	14	14	5,7 %
11	Tapung Hilir	-	16	16	6,5 %
12	Bangkinang	2	2	4	1,6 %
13	Bangkinang Seberang	2	7	9	3,6 %
14	Kampar	1	17	18	7,3 %
15	Kampar Timur	-	9	9	3,6 %
16	Rumbio Jaya	-	7	7	2,8 %
17	Kampar Utara	-	8	8	3,2 %
18	Tambang	-	17	17	6,9 %
19	Siak Hulu	-	12	12	4,8 %
20	Perhentian Raja	-	6	6	2,4 %
JUMLAH TOTAL		8	237	245	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar

Dari data tabel kecamatan dan desa serta kelurahan diatas menunjukkan bahwa, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Tapung berjumlah 25 dengan persentase 10,2%. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah kecamatan Bangkinang berjumlah 2 dan memiliki kelurahan berjumlah 2 kelurahan saja dengan jumlah persentase 1,6%.

E. Pembagian Wilayah

Pemerintahan Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut memiliki luas wilayah lebih kurang 27.908,32 km² dengan ibukota kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan <i>District</i>	Ibu Kota <i>Capital</i>	Luas Wilayah (Ha) <i>Area (Hectares)</i>	Persentase %
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,1 %
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11,5 %
3	Kampar Kiri Hilir	Sci. Pagar	759,74	6,7 %
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	2,9 %
5	Gunung Sahilan	Kebun Durian	597,97	5,3 %
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,4	6,5 %
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674	6,0 %
8	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	1,3 %
9	Salo	Salo	207,83	1,8 %
10	Tapung	Petapahan	1.365,97	12,1 %
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15	10,4 %
12	Tapung Hilir	Pantai Cermin	1.013,56	9,0 %
13	Bangkinang	Bangkinang	177,18	1,6 %
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50	2,2 %
15	Kampar	Air Tiris	136,28	1,2 %
16	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,5 %
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,7 %
18	Kampar Utara	Desa Sawah	79,84	0,7 %
19	Tambang	Sci. Pinang	371,94	3,3 %
20	Siak Hulu	Pangkalanbaru	689,80	6,1 %
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54	1,0 %
Total			11.289,28	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa empat Kecamatan yang luas wilayahnya di atas 1.000 kilometer persegi, yaitu Kampar Kiri Hulu dengan jumlah 1.301,25 dengan persentase 11,5 %, Tapung berjumlah 1.365,97 dengan persentase 12,1 %, Tapung Hulu 1.169,15 dengan persentase 10,4 % dan Tapung Hilir berjumlah 1.013,56 dengan persentase 9,0%.

F. Keadaan Demografi

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pertengahan tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 713.078 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 367.661 jiwa (51.56 persen) dan wanita 345.417 jiwa (48,44 persen). Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 106, yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6 % lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan <i>District</i>	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Persentase %
1	Kampar Kiri	91.533	27.946	31	8,1 %
2	Kampar Kiri Hulu	130.125	11.665	9	11,5 %
3	Kampar Kiri Hilir	75.974	10.097	13	6,8 %
4	Kampar Kiri Tengah	33.059	24.174	73	2,9 %
5	Gunung Sahilan	59.797	16.191	27	5,3 %
6	XIII Koto Kampar	140.640	38.661	27	12,4 %
7	Koto Kampar Hulu	7.324	21.510	29	0,6 %
8	Bangkinang Barat	15.141	23.990	158	1,3 %
9	Salo	20.783	22.261	107	1,8 %
10	Tapung	136.597	81.529	60	12,1 %
11	Tapung Hulu	116.915	70.857	61	10,3 %
12	Tapung Hilir	101.356	51.845	51	8,9 %
13	Bangkinang	17.718	33.765	191	1,6 %
14	Bangkinang Seberang	25.350	30.506	120	2,3 %
15	Kampar	13.628	45.441	333	1,3 %
16	Kampar Timur	17.308	22.595	131	1,5 %
17	Rumbio Jaya	7.692	16.608	216	0,7 %
18	Kampar Utara	7.984	18.010	226	0,8 %
19	Tambang	37.194	46.930	126	3,3 %
20	Siak Hulu	68.980	70.020	101	6,1 %
21	Perhentian Raja	11.154	16.194	154	1,0 %
Total		1.128.928	679.285	2.213	100

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/Km² dengan luas wilayah 13.628 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 45.441 jiwa dengan jumlah persentase 1,3%, diikuti oleh Kecamatan Bangkinang, 191 jiwa/Km² dengan luas wilayah 17.718 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 33.765 jiwa dengan jumlah persentase 1,6 %, sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/Km² dengan luas wilayah 130.125 dan jumlah penduduk 11.665 jiwa, diikuti oleh Kampar Kiri Hilir 13 jiwa/Km² dengan luas wilayah 759,54 dan jumlah penduduk 10.195 jiwa.

Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang* Kampar, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Adapun keadaan penduduk Kabupaten Kampar dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, agama, umur, dan tingkat pendidikan.

1. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2012

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	351.793	51,7 %
2	Perempuan	327.492	48,2 %
Total		679.285	100

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2011.

Melihat dari data tabel 2.4 mengenai jumlah penduduk di Kabupaten kampar sampai tahun 2012 terdapat 351.793 laki-laki dengan persentase berjumlah 51,7% dan 327.492 dengan persentase 48,2% perempuan di Kabupaten kampar. Total dari keseluruhan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kampar yakni berjumlah 679.285 orang.

2. Tabel 2.5 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 14	208.137	30,6%
2	15 – 64	449.882	66,2%
3	65 +	21.268	3,1%
Total		679.285	100

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2011

Tabel 2.5 menjelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kategori kelompok umur 15 – 64 dengan jumlah penduduk sebanyak 449.882 jiwa dengan persentase 66,2% dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah

kategori kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 21.268 jiwa dengan jumlah persentase 3,1%.

3. Tabel 2.6 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kampar Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman Kanak-kanak (TK)	309	33,1%
2	Sekolah Dasar (SD)	474	50,6%
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	92	9,8%
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	58	6,1%
5	PT/Politeknik/Sekolah Tinggi	3	0,3%
Total		936	100

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, STIE Bangkinang, Stikes Tuanku Tambusai.

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah sekolah yang terbanyak yakni sekolah dasar (SD) berjumlah 474 dengan persentase 50,6 % dan jumlah sekolah yang paling sedikit yakni Politeknik/ sekolah tinggi berjumlah 3 sekolah dengan persentase 0,3%.

4. Tabel 2.7 Jumlah Murid dan Mahasiswa di Kabupaten Kampar Tahun 2012

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman Kanak-kanak (TK)	10.496	7,4%
2	Sekolah Dasar (SD)	92.820	66,1%
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	22.506	16%
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13.093	9,3%
5	PT/Politeknik/Sekolah Tinggi	1.377	0,9%
Total		140.292	100

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, STIE Bangkinang, Stikes Tuanku Tambusai.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah murid dan mahasiswa terbanyak terdapat di sekolah dasar (SD) yakni 92.820 orang dengan persentase 66,1% dan jumlah murid dan mahasiswa di Kabupaten Kampar terendah terdapat di politeknik atau sekolah tinggi yakni 1.377 orang dengan persentase 0,9%.

5. Tabel 2.8 Persentase Keadaan Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Kampar

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	44.419	17,18 %
2	Perkebunan	72.318	27,98 %
3	Peternakan	14.485	5,6 %
4	Perikanan	8.835	3,42 %
5	Lain-lain	118.422	45,81 %
Jumlah		258.479	100

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2012.

6. Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kampar Tahun 2012

Kabupaten	Penduduk Miskin		Rumah Tangga Miskin	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Kampar Kiri	8.156	31,28	1.587	28,29
2. Kampar Kiri Hulu	5.842	48,55	1.077	43,15
3. Kmapar Kiri Hilir	3.076	31,45	440	17,76
4. Kampar Kiri tengah	3.679	16,58	869	15,04
5. Gunung Shailan	3.938	25,41	450	14,40
6. XIII Koto Kampar	13.269	36,08	3.769	41,33
7. Koto Kampar Hulu	13.166	25,07	2.929	40,23
8. Bangkinang Barat	3.433	15,20	708	14,10
9. Salo	2.968	13,78	1.028	19,52
10. Tapung	11.635	16,67	2.537	15,21
11. Tapung Hulu	8.244	11,88	1.757	9,82
12. Tapung Hilir	7.301	15,75	1.581	14,29
13. Bangkinang	1.467	4,63	669	9,36
14. Banagkinag Seberang	6.767	27,23	984	19,21
15. Kampar	6.882	15,81	1.150	12,40
16. Kampar Timur	2.699	12,98	633	13,29
17. Rumbio Jaya	2.281	15,04	501	14,78
18. Kampar Utara	1.988	12,83	550	15,60
19. Tambang	9.238	22,56	2.498	34,37
20. Siak Hulu	13.678	20,34	1.651	9,62
21. Perhentian Raja	1.838	13,25	664	20,25
TOTAL	131.546	19,92	28.032	18,26

Sumber: BPS Kampar Hasil Sensus Penduduk 2012

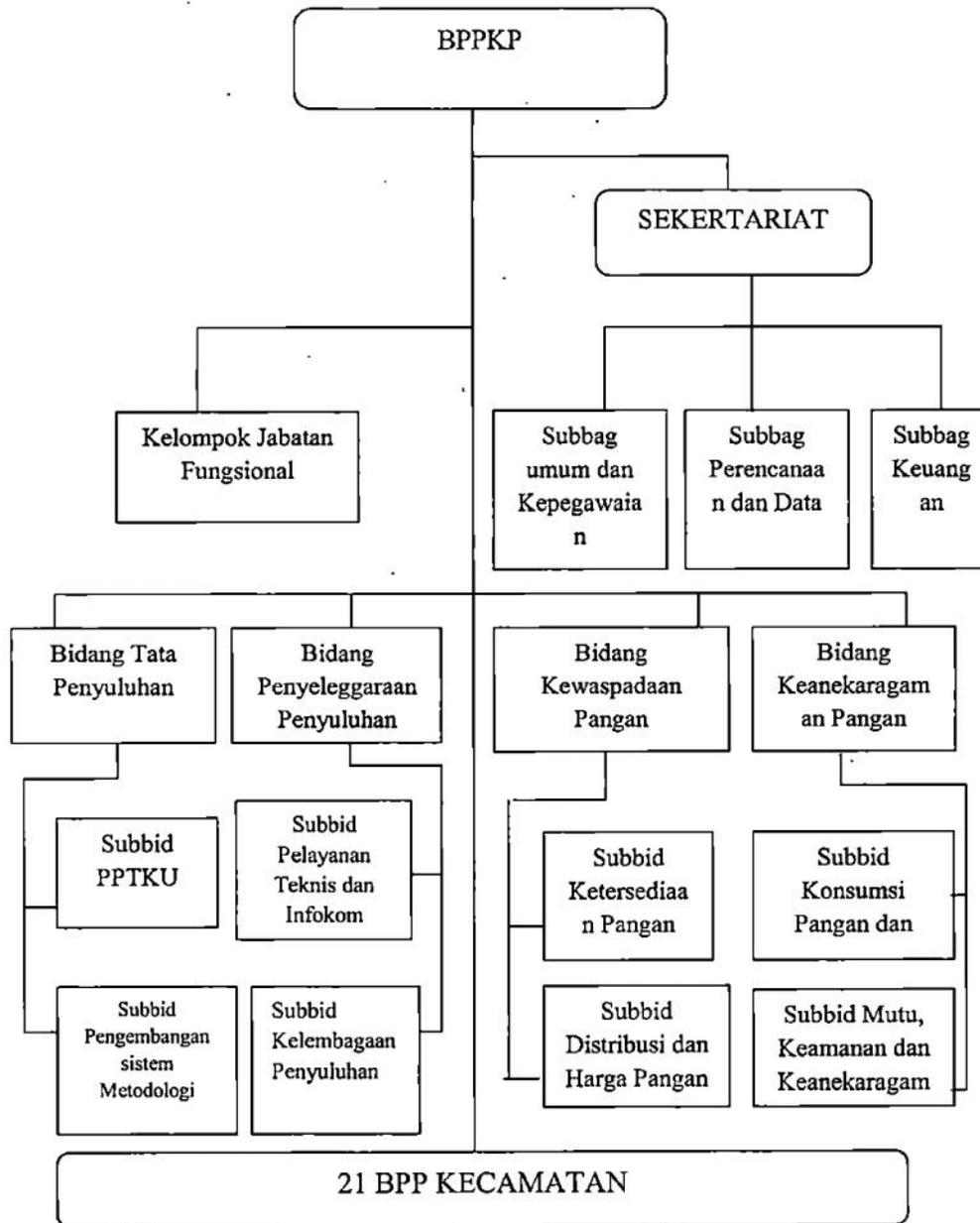
ditetapkan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk lembaga-lembaga teknis, salah satu diantaranya adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP), dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan serta bidang Ketahanan Pangan.

G.2. Gambaran Umum SKPD

G.2.1. Struktur Organisasi Kerja

Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekertaris Badan, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 8 (delapan) orang Kepala Sub Bidang serta 1 (satu) orang Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, dan membawahi 21 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, dengan struktur organisasi sebagaimana terlihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1. Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar



G.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta bidang Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:²⁶

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan;
- b. Menyusun rencana penyuluhan di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan, mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- d. Melaksanakan penyimpulan, pengelolaan, pengawasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- f. Menyusun rencana program penyuluhan di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
- g. Melaksanakan, mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;

²⁶ *Ibid.* hal.4

- h. Melaksanakan penyimpulan, pengelolaan, pengawasan dan penyeberan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Pemantauan dan evaluasi masalah kekurangan pangan dan gizi serta peningkatan mutu pangan dan gizi, pola konsumsi pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal;
- j. Penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka sosialisasi penganekaragaman pangan;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penata usahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, anggaran keuangan, perlengkapan serta organisasi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Melakukan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) per Kecamatan;

G.3. Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar

G.3.1. Visi

Selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar periode 2012-2016 yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kampar Madani, Berakhlak dan Bermoral Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera Berdaya Saing Pada Tahun 2016”**, maka Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar juga menetapkan visi yang hendak dicapai yaitu: **“Menjadi Institusi yang**

Handal, Inovatif dan Aspiratif dalam Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pemantapan Ketahanan Pangan”.

Dengan penetapan visi tersebut diharapkan akan mampu memberikan dorongan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM agar tetap eksis terhadap perubahan kearah yang lebih baik.

G.3.2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut perlu adanya misi sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar. Secara umum upaya tersebut dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanankan, maka misi yang diemban adalah:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Masyarakat Pelaku Agribisnis yang Profesional.

Dalam rangka pembangunan di bidang penyuluhan pertanian maka Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar harus secara optimal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tata usaha organisasi umum, keuangan, perlengkapan dan sumber daya manusia. Dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap stakeholders, integritas kelembagaan organisasi yang mantab

dan dinamis akan diakui bila responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pusat-pusat Informasi Agribisnis yang Handal dan Inovatif.

Peran sektor penyuluhan pertanian sebagai fasilitator/ penyedia sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani dan pelaku agribisnis. Perbaikan sistem model-model penyuluhan yang efektif dan efisien akan terus mendukung fungsi sektor pertanian sebagai tulang punggung penggerak perekonomian daerah di tahun-tahun mendatang.

Dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pusat informasi dan komunikasi yang merupakan upaya dalam pengelolaan usaha tani baik di pedesaan maupun di kecamatan, serta memberikan informasi tentang produk yang dihasilkan dan yang akan diproduksi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani. Pengembangan penyuluhan pertanian harus ditingkatkan agar mampu memberikan manfaat bagi kelompok tani sehingga diharapkan menjadi organisasi sosial ekonomi yang mandiri dalam menunjang perekonomian petani di wilayahnya.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Sesuai tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembanguana Daerah Kabupaten Kampar khususnya penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan maka BPPKP Kabupaten Kmpar harus secara sungguh-sungguh dengan mengoptimalkan pengelolaan tata usaha organisasi menyangkut masalah umum, keuangan, perlengkapan dan peralatan sumberdaya manusia.

- d. Meningkatkan Koordiansi Ketahanan Pangan Masyarakat yang Menyangkut Aspek Ketersediaan, Distribusi dan Komunikasi Pangan dengan Instansi Terkait.

Perwujudan dari ketahanan pangan yang handal adalah mendukung ketersediaan, distribusi dan keamanan penyediaan bahan pangan melalui pemanfaatan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai bagian dari upaya penciptaan sisitem ktahanan pangan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai upaya peningkatan yang melibatkan berbagai lapisan kalangan, diantaranya petani, dunia usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai lapisan umum masyarakat lainnya. Sedangkan tupoksi utama Badan Pelaksan Penyuluhan dan Ketahan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar adalah melaksanakan koordiansi dibidang

pemantapan ketahanan pangan dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah.

- e. Menumbuh-kembangkan dan memantapkan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan ketahanan pangan ditujukan dalam rangka mewujudkan SDM dan kelembagaan pangan yang bersifat mandiri dan profesional melalui penciptaan sitem jejaring dan kerjasama. Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan yang terkait terhadap SDM dan kelembagaan ketahanan pangan dapat segera ditangani. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan yang memiliki nilai tambah dan daya saing usaha yang pada akhirnya dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang berbasis kerakyatan yang dapat memberikan jaminan sekaligus sebagai penopang kehidupan utama masyarakat.

H. Program Zero Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan bersifat multidimensi. Luasnya wilayah Kabupaten Kampar dan karakteristik kemiskinan yang berbeda membutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang berbeda pula. Kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Kampar yang pada umumnya berada pada wilayah perdesaan dan daerah-daerah terisolir yang memiliki keterbatasan aksesibilitas, tinggal secara terpencar-

pencar, pada umumnya memiliki keterbatasan modal, produksi dan pemasaran, kelompok usia produktif didominasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan, dengan produktifitas dan enterpreunership yang rendah pula, serta memiliki daya saing yang lemah terutama dalam merebut peluang usaha, mengisi peluang kerja dan memasarkan hasil produksi.

Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang hendak diwujudkan pada Tahun 2016 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kampar Madani, Berakhlak dan Bermoral Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera Berdaya Saing Pada Tahun 2016”**. Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ingin dicapai pada Tahun 2016 di Kabupaten Kampar, dengan ukuran sebagai berikut:

1. Berakhlak dan bermoral, mencerminkan masyarakat yang agamis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dan menerapkannya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.
2. Yang madani dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat keadilan dan kesetaraan perkembangan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.
3. Tingkat kehidupan yang sehat dan sejahtera, juga dapat diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya

berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Suatu daerah dikatakan makin maju dan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Hal ini tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan.

4. Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju dan sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktifitas yang makin tinggi.
5. Daerah yang berdaya saing dan sejahtera juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju dan sejahtera juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.
6. Berdaya saing (competitive) adalah salah satu ukuran kemajuan yang dicapai. Berdaya saing disini dimaksudkan bahwa Kabupaten Kampar menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Provinsi Riau, baik dari segi kualitas pemerintahan, tingkat

kesejahteraan, pemerataan, pelayanan, infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Misi Pembangunan Kabupaten Kampar sebagai upaya
merealisasikan visi tersebut, adalah:

1. Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa,
menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang
menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam
menghadapi tantangan global.
2. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk
meningkatkan SDM yang bermartabat melalui penguasaan
IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan
peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing
global.
3. Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk
membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh.
4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang
dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan organisasi pemerintahan agar dapat
terlaksanakan dengan arah tujuan yang jelas, terukur dan berkesinambungan,
maka perlu disusun langkah dan strategi dalam sebuah program

pembangunan yang merupakan suatu kerangka pemikiran untuk mewujudkan sebuah visi, misi yang tersusun guna menentukan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Untuk mewujudkan visi, misi itu maka pemerintah mencanangkan Pembangunan Kabupaten Kampar dengan Lima Pilar Pembangunan sebagai pondasi dan bingkainya, kelima pilar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akhlak Dan Moral
2. Meningkatkan Ekonomi Rakyat
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
5. Peningkatan Infrastruktur

Dari lima pilar pembangunan diatas, di kerucutkan menjadi tiga zero yakni, zero kemiskinan, zero rumah-rumah kumuh dan zero pengangguran. Adapun konsep zero kemiskinan yang dirancang Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan gagasan yang telah dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi, mulai dari rumusan perencanaan, implementasi ditengah masyarakat hingga dampaknya bagi masyarakat luas. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:²⁷

²⁷ Riaupos. 2013. *Kampar Menuju Zero Kemiskinan*. (online). (diakses 4 Maret 2013). Ditemukan pada: <http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=16584&kat=3#.UTSuNqJTDjM>

1. Pemerintah Kabupaten Kampar me-mapping kondisi riil masyarakat Kampar disetiap desa melalui camat dan kepala desa.
2. Membuat program-program untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan keahlian masing-masing (peternakan, perikanan, pertanian pasca panen dan lain-lain).
3. Dari hasil mapping diadakan pelatihan sesuai dengan keahlian masing-masing (peternakan, perikanan, pertanian pasca panen dan lain-lain).

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dalam rangka sosialisasi dan percepatan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mewujudkan Zero Kemiskinan, perlu dilaksanakan langkah-langkah perencanaan, penanganan dan pendekatan yang sistematis, menyeluruh, dan terkoordinasi secara terpadu antar lintas pelaku dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) sebagai tim koordinator percepatan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mewujudkan Zero Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 500/Adm-Ek/119 tentang pembentukan tim sosialisasi dan percepatan pelaksanaan program Zero Kemiskinan.